

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak merupakan generasi muda yang diciptakan untuk menjadi penerus negara. Anak memegang peranan penting dalam suatu negara karena menjadi pelaksana serta pemegang kontrol masa depan negara, tidak lain Indonesia sendiri. Aspek tersebut dapat dipenuhi jika pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak dapat terlaksana dengan baik dalam hal fisik, mental, dan psikososial demi terciptanya generasi muda yang berkualitas dalam menghadapi tantangan yang terjadi di masa yang akan datang. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak diharapkan dapat berperan besar dalam membesarkan anak terutama memperlakukan anak sesuai dengan hak-haknya.

Anak memiliki hak yang harus dijamin dan dipenuhi sesuai Konvensi Hak Anak (Convention of The Rights of The Child) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pasal 1 butir 12 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa hak anak wajib dilindungi bagi semua pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya, negara belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Sebagian besar, anak-anak belum mendapat hak untuk berkembang serta tumbuh. Hal ini terbukti oleh banyaknya kasus dan masalah yang melibatkan anak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga, anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap perilaku kekerasan.

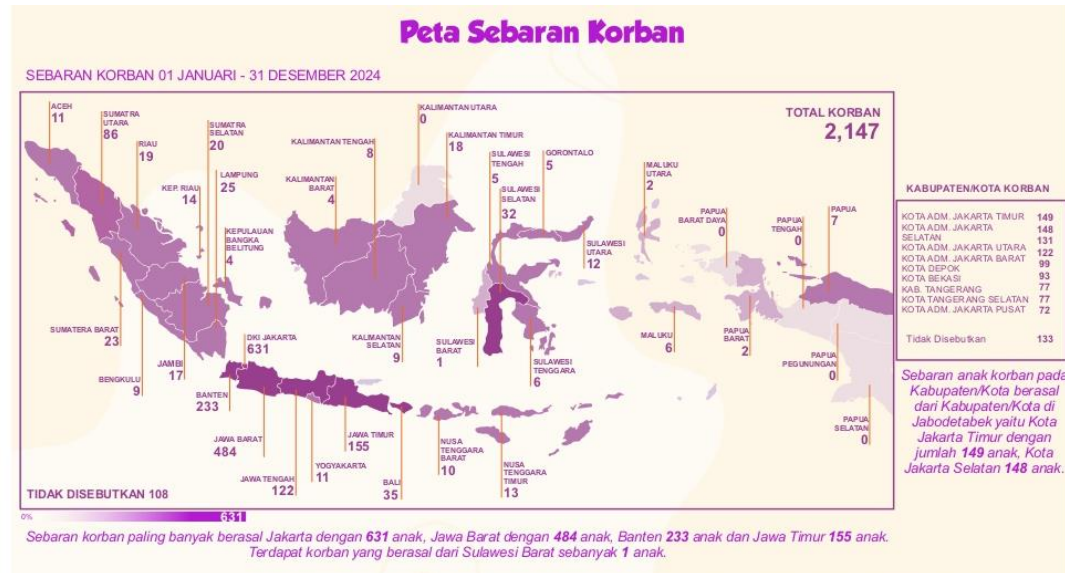
Tabel 1. 1 Jumlah Kekerasan terhadap Anak di Indonesia pada Tahun 2019-2023

NO.	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH KASUS
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2019	4.099	8.185	11.055
2.	2020	3.600	8.810	11.264
3.	2021	4.525	11.389	14.446
4.	2022	4.126	13.515	16.106
5.	2023	5.772	14.449	18.175

Sumber : SIMFONI-PPA, 2023

Meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa anak dari tahun ke tahun tersebut sangat beragam. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tidak terbatas pada kekerasan fisik saja, namun kekerasan secara verbal juga sering ditemui. Kekerasan tersebut berupa diskriminasi terhadap anak yang minoritas, memanipulasi, mengejek, dan menghina. Hal ini sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak, terutama kesehatan mental seorang anak. Hal ini merupakan gambaran bahwa sampai dengan saat ini kondisi anak di Indonesia ternyata masih terancam kehidupannya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia.

Gambar 1. 1 Peta Sebaran Korban Kekerasan di Indonesia, 2024



Sumber: Website Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan ibukota negara dengan penduduk yang tinggi. DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah administratif, antara lain Kota Administratif Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Meskipun menjadi salah satu kota metropolitan yang maju, Provinsi DKI Jakarta menghadapi sejumlah masalah umum, seperti kemacetan dan banjir, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

Tabel 1. 2 Data Kekerasan terhadap anak berdasarkan Wilayah DKI Jakarta dari Tahun 2018-2022

NO.	WILAYAH	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jakarta Selatan	126	76	63	190	177
2.	Jakarta Timur	225	258	137	186	220
3.	Jakarta Pusat	58	67	41	133	85
4.	Jakarta Barat	120	91	128	269	194
5.	Jakarta Utara	69	48	91	97	115
6.	Kepulauan Seribu	1	3	1	4	3

Sumber : SIMPONI PPA, 2023

Kekerasan di DKI Jakarta juga banyak terjadi di lingkup pendidikan, padahal perkembangan karakteristik seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai perilaku yang melewati batas kode etik dan peraturan pendidikan. Pelaku dari kekerasan ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang ada di sekolah.

Tabel 1. 3 Data Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	TINGKAT PENDIDIKAN			JUMLAH KASUS
		SD	SMP	SMA	
1.	2018	153	105	39	297
2.	2019	233	123	60	416
3.	2020	166	131	54	351
4.	2021	246	197	168	611
5.	2022	227	230	115	572
6.	2023	154	107	40	301
7.	2024	410	334	168	912

Sumber : SIMPONI PPA, 2024

Jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat tiap tahunnya. Jenis kasusnya beragam, tetapi kasus perundungan dan kekerasan seksual menjadi yang terbanyak meski pemerintah sudah membuat peraturan antikekerasan di satuan pendidikan. KPAI mendapati sebanyak 44 persen kasus kekerasan dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah. KPAI mendapati kekerasan fisik oleh guru dilakukan dengan dicubit, dipukul, ditampar, dibentak, dimaki, dijemur di terik matahari, hingga dihukum lari keliling lapangan sekolah. Hukuman ini sebagai modus mendisiplinkan siswa.

Dalam rangka pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan “World Fit for Children” (Dunia yang Layak bagi Anak), yang mencakup tujuan dan strategi dunia untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak-anak, serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dengan menekankan kerja sama antara berbagai pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menyelenggarakan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak tercermin dalam penerbitan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menggantikan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Peraturan tersebut menyatakan bahwa KLA bertujuan untuk membangun sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia untuk mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. IDOLA menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, sejalan dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB atau Sustainable Development Goals (SDG) dalam hal target SDGs, terutama dalam bidang pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), dan pengurangan ketidaksetaraan (SDG 10).

Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menguraikan hak-hak anak ke dalam lima kluster untuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, kluster hak sipil dan kemerdekaan, kluster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni, dan kluster perlindungan khusus. Pemerintah menetapkan program prioritas untuk perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak yang dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029. Ini akan mencakup membangun negara yang ramah anak dan responsif sesuai dengan berbagai kondisi geografis dan budaya terhadap pemenuhan hak anak. Walaupun, masih menjadi tantangan besar bagi negara untuk melindungi pemenuhan hak. Kasus kekerasan yang melibatkan anak meningkat menunjukkan bahwa hak anak atas perlindungan masih perlu diperhatikan.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga masuk dalam wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. KLA dikembangkan mulai dari kabupaten/kota. Kabupaten/kota dapat dikatakan KLA apabila seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut layak anak. Dalam menentukan apakah suatu kabupaten/kota termasuk dalam kategori KLA, Pemerintah menetapkan 6 indikator kelembagaan untuk menilai kesiapan struktural daerah dan 25 indikator substansi untuk mengukur dampak nyata pada kesejahteraan anak yang dikelompokkan

dalam 5 klaster hak anak yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu kota yang berupaya untuk mewujudkan kota yang layak bagi anak adalah Kota Jakarta Selatan.

Tabel 1. 4 Penghargaan Kota Layak Anak yang diperoleh Kota Jakarta Selatan

NO.	TAHUN	PENGHARGAAN
1.	2019	Madya
2.	2020	Madya
3.	2021	Nindya
4.	2022	Nindya
5.	2023	Pratama

Sumber : Website Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2023

Penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) ini terdiri dari 4 peringkat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Jika dilihat dari tabel 1.2, Kota Jakarta Selatan terus berupaya untuk meningkatkan peringkat dari Madya menjadi Pratama. Kota Jakarta Selatan berhasil mendapatkan peringkat pratama di tahun 2023.

Penghargaan yang diperoleh Kota Jakarta Selatan tersebut tidak serta merta membuat Kota Jakarta Selatan terbebas dari permasalahan-permasalahan anak. Kekerasan terhadap anak masih menjadi isu anak yang masih dijumpai di Kota Jakarta Selatan. Tabel 1.3 menunjukkan kenyataan bahwa Kota Jakarta Selatan masih memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang tergolong tinggi di wilayah tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa walaupun secara pengakuan formal Kota Jakarta Selatan dinilai layak bagi anak, masih terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dan keamanan anak-anak di kota ini.

Masih banyaknya kekerasan terhadap anak di Jakarta Selatan membuat pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan Jakarta sebagai Kota yang berbasis terhadap kesejahteraan Anak. Langkah awal Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam mewujudkan Kota Jakarta Selatan menjadi kota yang layak anak sendiri dibuktikan dalam dibentuknya sebuah peraturan guna mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak, yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011, tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak dan dengan mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 184 Tahun 2021 dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta. Kementerian PPPA yang mewakili Pemerintah menginisiasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 8 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Adanya Sekolah Ramah Anak bertujuan demi terwujudnya Kota DKI Jakarta sebagai Kota yang layak untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kota Layak Anak memiliki tatanan sistem berlandaskan hak anak melalui kerjasama antara sumber daya pemerintah, masyarakat,

dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan upaya untuk memastikan hak anak terpenuhi.

Program ini ditujukan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu tingkat Pendidikan paling rendah, yaitu Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA dan Sekolah Menengah Kejuruan. Saat ini, Indonesia memiliki total 65.877 Sekolah Ramah Anak dengan 344 di tingkat kabupaten dan kota, dan 34 di tingkat provinsi.

Tabel 1. 5 Data Sekolah Ramah Anak di Wilayah DKI Jakarta

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN SRA				TOTAL SRA
		SD	SMP	SMA	SMK	
1.	Kepulauan Seribu	14	7	1	1	23
2.	Kota Jakarta Selatan	45	14	17	12	88
3.	Kota Jakarta Timur	72	102	11	2	187
4.	Kota Jakarta Pusat	122	29	17	13	181
5.	Kota Jakarta Barat	34	18	13	4	69
6.	Kota Jakarta Utara	102	57	12	15	186

Sumber : Satuan Pendidikan Ramah Anak Official Instagram, 2024

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah sekolah ramah anak di wilayah Jakarta Selatan masih terbilang sedikit. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi anak-anak guna mengurangi risiko kekerasan.

Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, terutama anak. Hal ini menjadikan sekolah sebagai tempat utama di mana anak-anak belajar setelah rumah. Maka, sudah sepatutnya sekolah menjadi tempat yang aman untuk terwujudnya generasi yang terampil dalam pemikiran, tetapi juga pandai dalam emosional maupun spiritual. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 54 yang menjelaskan bahwa anak dijamin untuk dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Semakin rendah tingkat pendidikan seorang anak maka semakin tinggi mendapat perilaku kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak memenuhi hak anak untuk mendapatkan tempat yang aman dan nyaman. Padahal, selama kurang lebih 8 jam anak berada di lingkungan. Pendekatan pendidikan yang masih menempatkan anak sebagai objek dan memberikan otoritas mutlak pada guru, seringkali berkontribusi terhadap kejadian *bullying* di lingkungan sekolah/madrasah. Pengalaman bersekolah tidak selalu menciptakan kesan yang menyenangkan bagi anak.

Kementerian PPPA yang mewakili Pemerintah menginisiasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 8 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Adanya Sekolah Ramah Anak bertujuan demi terwujudnya Kota DKI Jakarta sebagai Kota yang layak untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kota Layak Anak memiliki tatanan sistem

berlandaskan hak anak melalui kerjasama antara sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan upaya untuk memastikan hak anak terpenuhi.

Sekolah diharapkan untuk selalu memperhatikan, melindungi, dan menjamin semua kebutuhan anak. Pemerintah berharap hak anak akan terpenuhi dengan adanya sekolah ramah anak sehingga anak dapat secara aktif terlibat dalam semua kegiatan, dan mendapat fasilitas yang nyaman dan aman .

Sekolah Ramah Anak yang berhasil memiliki pengaruh terhadap keberhasilan Kota Layak Anak di Kota Jakarta Selatan. Namun, pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak dinilai belum sempurna dan dampak yang dihasilkan belum dirasakan oleh sebagian pihak. Masih adanya beberapa sekolah di Jakarta Selatan yang hanya memakai predikat Sekolah Ramah Anak namun belum mengimplementasikan prinsip dan tujuan Sekolah Ramah Anak dengan baik. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi konsep Sekolah Ramah Anak bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi masalah atau kesempatan perbaikan.

Ketidaktepat sasaran predikat Sekolah Ramah Anak ini terlihat di salah satu sekolah, yaitu SMP Negeri 73, yang terletak di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. SMP Negeri 73 Jakarta merupakan salah satu sekolah jenjang SMP berstatus Negeri yang sudah menerapkan program Sekolah Ramah Anak sejak tanggal 29 September 2022 .

SMP Negeri 73 Jakarta didirikan pada tanggal 21 Februari 1968 dengan Nomor SK Pendirian 7787/1987 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 969 siswa ini dibimbing oleh 45 guru yang profesional di bidangnya. Sekolah ini telah meraih akreditasi A dan menerapkan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Namun, SMP Negeri 73 belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk program Sekolah Ramah Anak. Hal ini diperkuat oleh insiden yang terjadi pada bulan Mei 2024, di mana salah satu siswa melompat dari lantai 3 akibat merasa terasing dan dijaui oleh teman-temannya. Kasus ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap budaya inklusif dan dukungan emosional di lingkungan sekolah, serta pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

Siswa SMPN 73 Jakarta Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah, Teman Singgung Aksi *Bullying*

Disdik DKI Jakarta masih mendalami kasus siswa SMPN 73 melompat dari gedung sekolah.

Gambar 1. 2 Berita diduga Kasus Bullying di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan
Sumber: Republika (2024), "Siswa SMPN 73 Jakarta Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah, Teman Singgung Aksi Bullying"

Penerapan konsep Sekolah Ramah Anak bukan hanya menjadi syarat untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak, melainkan juga merupakan indikasi bahwa sekolah-sekolah tersebut telah menerapkan keenam indikator yang telah ditetapkan

serta mengikuti pedoman dari Kementerian PPA mengenai satuan pendidikan yang ramah anak. Pemerintah berusaha untuk terus menurunkan angka kekerasan di sekolah dengan menetapkan sekolah sebagai model percontohan Sekolah Ramah Anak.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Program Sekolah Ramah di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan**” dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sekolah Ramah Anak dengan lokasi penelitian di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan yang merupakan salah satu Sekolah Ramah Anak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian menjadi “Bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menganalisis implementasi program Sekolah Ramah Anak serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan.”

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi keilmuan bagi organisasi pengembangan masyarakat dengan fokus tertentu program Sekolah Ramah Anak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi instansi terkait, penelitian ini digunakan dalam rangka memberikan informasi untuk mengetahui perubahan yang terjadi ketika program diimplementasikan.
- b. Bagi Sekolah, penelitian ini digunakan sebagai bahan deskripsi bagi guru.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan baru untuk masyarakat mengenai gambaran umum adanya Program Sekolah Ramah Anak.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Mengacu pada berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini, literatur yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/T AHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
1.	Nabilah Dini Ramadhani, Ertien Rining Nawang Sari / 2023 / Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Judul Penelitian Implementasi Program Smart Inclusive School (SIS)	Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi program SIS di SMP Negeri 28 Surabaya dengan menggunakan model kesesuaian implementasi program David C. Korten Metode Penelitian pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif melalui teknik observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi	Implementasi program David C. Korten yang terdiri dari 3 elemen yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran.	Program Sekolah Cerdas Inklusif telah dijalankan dengan baik oleh sekolah, peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), dan orang tua. Guru serta pendamping khusus yang terlibat dalam pelaksanaannya telah mendapatkan pelatihan sehingga memiliki pemahaman yang memadai dalam mendukung PDBK. Program ini memberikan manfaat bagi PDBK dan orang tua, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyesuaian lingkungan bagi peserta didik.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik penelitian dan persamaan terletak pada penggunaan teori.
2.	Aurora Andi Tribuana,	Tujuan Penelitian	Penelitian ini menerapkan	Hasil dari penelitian tersebut	Penelitian ini memberikan

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
	Indira Arundinasari/ 2024 / Journal Of Social Science Research Judul Penelitian Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Guna Membentuk Ketahanan Keluarga di Kelurahan Rungkut Surabaya	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan program PUSPAGA di Kelurahan Rungkut Kidul. Metode Penelitian Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	teori implementasi program seperti yang dikemukakan oleh David C. Korten, yaitu 1. kesesuaian antara program dengan pemanfaat, 2. kesesuaian program antara program dengan organisasi pelaksana, serta 3. kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.	menjelaskan bahwa implementasi program pada Kelurahan Rungkut Kidul dapat dikatakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kasus yang terjadi pada lingkup keluarga. Selain itu juga dapat menambah wawasan orang tua terhadap pola asuh dan membentuk ketahanan keluarga	kontribusi kepada penulis berupa penggunaan teori yang sama. Perbedaan dari penelitian ini adalah topik penelitian yang dibahas.
3.	Aida Nur Azizah, dkk / 2023 / Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Judul Penelitian Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk	Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan ramah anak berdasarkan model implementasi Richard F. Elmore. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini menggunakan tahapan teori implementasi kebijakan Richard Elmore, yaitu Identifikasi jaringan aktor kebijakan, Jenis kebijakan publik, Kebijakan sesuai harapan, dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Yogyakarta belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan program masih didominasi oleh	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan yang akan digunakan beserta penjabaran faktor pendukung dan penghambat.

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
	Mewujudkan Perilaku Antikekerasan	pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif	Prakarsa masyarakat	aktor internal sekolah.	Persamaan dari penelitian ini adalah topik penelitian yang dibahas, yaitu penerapan program Sekolah Ramah Anak.
4.	Ariska Tri Viky Andani, dkk / 2019 / Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Judul Penelitian Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota	Tujuan Penelitian Mengkaji tentang Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program One Day Service di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang. Metode Penelitian Penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen	Penelitian ini menerapkan teori implementasi program seperti yang dikemukakan oleh David C. Korten,	Program One Day Service di BPN Kota Malang mempercepat pelayanan pertanahan sesuai kebutuhan masyarakat. Keberhasilannya didukung oleh petugas yang kompeten, fasilitas memadai, dan sistem komputerisasi. Namun, kendala seperti berkas tidak lengkap, reaksi emosional pemohon, dan keterbatasan sistem masih menjadi hambatan.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik penelitian. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis berupa penggunaan teori yang sama.
5.	Sukma Asmaning Putri, Ertien	Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah	Teori implementasi dari David C.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
	Rining Nawangsari/ 2023 / Jurnal Kebijakan Publik Judul Penelitian IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT	untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung. Metode Penelitian penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	Korten, yang meliputi tiga elemen yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran.	program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Tulungagung telah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan ini terlihat dari penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas. Selain itu, efektivitas program didukung oleh pemahaman dan kesiapan anggota satlantas dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang mendukung pencapaian tujuan ETLE.	yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik penelitian. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis berupa penggunaan teori yang sama.
6.	Ahmadi Ridhoi Giovani, Dkk / 2024/ Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Judul Penelitian	Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai secara jelas adalah pelaksanaan implementasi Kartu Identitas Anak (KIA), didukung oleh kebijakan yang dirancang untuk mewujudkan	Penelitian ini didasarkan pada teori David C. Korten, yang menekankan indikator-indikator program, termasuk kejelasan tujuan sebagai salah	Indikator keberhasilan pelaksanaan program bergantung pada kesesuaian antara tugas yang diperlukan dengan kapasitas organisasi pelaksana. Hal ini	Persamaan penelitian berupa kegunaan teori dan perbedaan terletak di topik penelitian.

NO	PENELITI/T AHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
	Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun	keberhasilan program tersebut. Metode Penelitian Pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengamatan, kegiatan tanya jawab, dokumentasi dan audio visual bahan.	satu aspek utama dalam keberhasilan implementasi.	mencakup keterpaduan antara persyaratan program dan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan KIA. Oleh karena itu, kapasitas pelaksana menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi, terutama dalam proses penerapan KIA.	
7.	Lila Amelia Safitri, Agus Widiyarta/ 2024/ Journal Of Social Science Research Judul Penelitian Implementasi Program Pelayanan Malam Dalam Kepengurusan	Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pelayanan Malam di Kelurahan Jambangan, Surabaya Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Program oleh David C. Korten, yaitu 1. kesesuaian antara program dengan pemanfaat, 2. kesesuaian program antara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga Jambangan sangat antusias untuk mengikuti program pelayanan malam karena sesuai dengan kebutuhan dan keluhan masyarakat. Selain mudah dan tepat waktu, pemahaman petugas terhadap proses dan	Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis berupa penggunaan teori yang sama. Perbedaan dari penelitian ini adalah topik penelitian yang dibahas.

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
	Administrasi Kependudukan di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya	pendekatan deskriptif serta termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dimana penelitian ini memberikan gambaran implementasi Pelayanan Malam di Balai RW/RT Kelurahan Jambangan	program dengan organisasi pelaksana, serta 3. kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana	persyaratan sangat memadai dan sesuai dengan prosedur yang ada.	
8.	Yolandini Putri / 2020 / Jurnal Ilmu Administrasi Negara Judul Penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Sma Negeri 3 Kota Kediri	Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang berasal dari observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah reduksi data.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa feb ukuran dan tujuan kebijakan telah berjalan dengan baik. SMA Negeri 3 Kota Kediri mampu menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan fisik terhadap anak. Pada fenomena sumber daya telah berjalan cukup baik, terdapat pelatihan Konvensi Hak Anak.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan yang akan digunakan beserta penjabaran faktor pendukung dan penghambat. Persamaan dari penelitian ini adalah topik penelitian yang dibahas, yaitu penerapan program Sekolah Ramah Anak.

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
			ekonomi sosial dan politik.		
9.	Franklin Asido Rossevelt/ 2022/ Atlantis Press Judul Penelitian The Role of the Cianjur Regency Government in the Implementation of Child Protection to Create Child-Worthy Districts	Tujuan Penelitian Upaya kawasan dalam menerapkan perlindungan anak diarahkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak, seperti perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan tidak adil, eksploitasi, dan penelantaran, ditegakkan secara sistematis. Metode Penelitian Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif.	Grindle (1980:6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administratif,	Peran pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak belum dapat dipenuhi dengan baik. Kabupaten Cianjur menawarkan dan memberikan hak-hak anak secara layak dan berkeadilan, namun hanya satu yang dapat lebih dipenuhi yaitu klaster Hak Sipil dan Kebebasan.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan yang akan digunakan beserta penjabaran faktor pendukung dan penghambat.
10.	Somariah Fitriani dan Istaryatiningtias/ 2020/ 1 <i>International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)</i> ,	Tujuan Penelitian Menjelaskan peran komite sekolah dalam mendukung dan mengimplementasikan model Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif.	Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III dalam implementasi kebijakan. Teori ini menyoroti empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah berperan dalam mendukung dan mengawasi implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA), namun dengan perbedaan antara sekolah negeri dan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan yang akan digunakan beserta penjabaran

NO	PENELITI/T AHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
	Judul Penelitian Promoting child-friendly school model through school committee as parents' participation		implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.	swasta. Di sekolah negeri, komite lebih aktif dalam sosialisasi dan pemantauan perilaku siswa, sementara di sekolah swasta lebih fokus pada dukungan finansial. Keterlibatan mereka masih terbatas pada aspek monitoring dan belum mencakup perencanaan strategis sekolah. Komunikasi dengan sekolah lebih efektif di sekolah negeri dibanding swasta. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman komite tentang perannya dan keterbatasan waktu anggota komite.	faktor pendukung dan penghambat.

Sumber : Diolah penulis, 2024

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian terdahulu, ditemukan perbedaan dalam hal pendekatan teori implelementasi program, peneliti menggunakan teori David

C. Korten yang berfokus pada kesesuaian implementasi program Sekolah Ramah Anak dan fokus masalah terkait pelaksanaan SRA yang berorientasi pada 6 indikator yakni kebijakan SRA, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana, partisipasi anak, dan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan, dan alumni, di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi memiliki definisi dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dapat didefinisikan sebagai pemberi layanan, pemeliharaan atau memenuhi. Administrasi memiliki dua arti, yakni dalam arti sempit mencakup kegiatan mencatat, menulis, dan administrasi umum, sementara dalam arti luas mencakup tahapan kerjasama yang rasional dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dapat berubah secara cepat dan mengikuti perubahan zaman. Administrasi Publik adalah ilmu sebagai seni untuk mengatur masalah publik dan melaksanakan berbagai peran yang sudah ditentukan. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:7), ilmu dan bidang ini mempelajari bagaimana memperbaiki masalah kelompok, sumber daya manusia, dan finansial.

Menurut Jhon M. Pffiner dan Robert V. Presthus (Pasolong, 2022)1960:4, administrasi publik melibatkan implementasi kebijakan pemerintah yang telah

disepakati oleh badan-badan perwakilan politik, serta koordinasi usaha individu dan kelompok untuk menjalankan kebijakan tersebut. Proses administrasi publik melibatkan berbagai aspek, termasuk arah kebijakan, keterampilan, teknik, dan pemberian panduan dalam mencapai tujuan bersama sejumlah orang. Ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang terorganisir dan kolaboratif dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat yang efektif dan efisien.

David H. Rosenbloom (Pasolong, 2022) menyatakan bahwa dalam administrasi publik, teori, proses manajemen, politik, dan hukum digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pemerintah di sektor legislatif dan eksekutif. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara keseluruhan maupun bagi sebagian kelompok dalam masyarakat.

Maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari sistem dan tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pemerintah di sektor legislatif dan eksekutif, serta untuk menyajikan pelayanan kepada masyarakat serta membuat kebijakan yang berpihak, responsif, dan efisien untuk masyarakat. Dalam konteks Sekolah Ramah Anak (SRA), keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan siswa. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam pemenuhan hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Oleh karena

itu, sistem pemerintahan yang baik harus mengutamakan efektivitas kebijakan serta memastikan setiap elemen dalam SRA berjalan selaras untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi peserta didik.

1.5.3 Paradigma administrasi publik

Administrasi Publik mengalami perkembangan pesat hingga saat ini. Seiring dengan kemajuan ilmu dan praktik administrasi publik, banyak pula perkembangan yang terjadi. Administrasi publik dirancang sebagai ilmu yang menggunakan enam paradigma yang tumpang tindih. Setiap tahap paradigma memiliki karakteristik khusus tergantung pada lokus dan fokus-nya. Lokus menampakkan di mana area penelitian berada, dan fokus menampakkan tujuan dari spesialisasi penelitian.

Paradigma administrasi publik mengacu pada kerangka pemikiran dan pandangan dasar yang mendasari pendekatan dan praktik dalam bidang administrasi publik. Paradigma ini membentuk dasar pemahaman tentang apa yang penting, bagaimana pemerintah harus beroperasi, dan bagaimana kebijakan dan program seharusnya dirancang dan diimplementasikan. Menurut Nicholas Henry mengemukakan ilmu paradigma administrasi publik, sebagai berikut

1. Paradigma 1 : Dikotomi politik-administrasi (1900-1926)

Paradigma ini mengemukakan bahwa fungsi politik dan fungsi administrasi harus dipisahkan sebagai strategi untuk efisiensi dan efektivitas. Dalam birokrasi dan pemerintahan, administrasi harus bebas nilai dan diarahkan untuk mewujudkan nilai

efisiensi dan ekonomi. Tugas administrasi hanya terbatas pada organisasi, kepegawaian, dan mencatat pemasukan maupun pengeluaran uang. Sedangkan fungsi politik terbatas pada masalah-masalah pemerintahan, politik dan kebijaksanaan. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara ini berada.

2. Paradigma 2 : Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini mengalami kemajuan menuju orientasi manajemen yang disusul dengan prinsip-prinsip paradigma administrasi melalui pengangkatan administrasi publik, administrasi/manajemen ke status ilmu pengetahuan. Gulick dan Urwick mengemukakan tujuh prinsip administrasi yang dikemukakan oleh, yaitu POSDCoRB (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, Penganggaran). Namun, kelemahan dari paradigma ini adalah lokus yang tidak begitu jelas dan tidak pernah dinyatakan dengan tegas karena adanya asumsi bahwa prinsip administrasi bisa diterapkan di mana pun atau bersifat universal walaupun memiliki perbedaan visi, lingkungan, dan kebudayaan.

3. Paradigma 3 : Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini berfokus pada kembalinya administrasi publik ke bidang ilmu politik karena administrasi publik pada dasarnya tunduk kepada kekuasaan mengabdikan untuk membantu penguasa memerintah dengan lebih baik. Dalam masa ini Umar (Pasolong:2022), terdapat dua perkembangan baru, diantaranya (1) Perkembangan

penggunaan studi kasus sebagai sarana epistemologis, dan (2) Munculnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian penting dalam ilmu administrasi.

4. Paradigma 4 : Administrasi negara sebagai administrasi (1956-1970)

Paradigma ke-4 telah berkembang dari administrasi negara menjadi ilmu administrasi. Prinsip-prinsip administrasi dikembangkan menjadi lebih rasional, objektif, netral, dan mendalam. Paradigma ini memiliki fokus pada masalah organisasi. Paradigma ini berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial dan pada kebijakan publik. Fokus dalam paradigma ini diasumsikan berlaku tidak hanya dalam lingkup bisnis, tetapi juga dalam konteks administrasi publik. Lokasi atau lokus paradigma ini juga tidak jelas atau dapat diterapkan di berbagai tempat.

5. Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang tegas dan jelas Administrasi publik sebagai teori organisasi, teori manajemen, dan teori kebijakan publik dengan lokus urusan masalah-masalah dan kepentingan publik. Paradigma lebih mencakup teori organisasi daripada hanya fungsi administrasi.

6. Paradigma 6 : Governance / Tata Kelola (1990-sekarang)

Paradigma ini berfokus pada cara dan proses yang digunakan oleh individu maupun masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka, mendiskusikan perbedaan mereka, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Paradigma baru dalam sistem pengelolaan pemerintahan dikenal sebagai *governance*. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat membentuk tiga pilar pemerintahan.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada paradigma ke-6 (lima) yaitu *Governance / Tata Kelola*. Paradigma ke-6 ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, guru, komunitas, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan. SRA mengedepankan partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dalam kerangka *governance*, Sekolah Ramah Anak sering melibatkan berbagai pihak untuk berkolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program dan kebijakan yang ramah anak. Sekolah Ramah Anak sering melibatkan berbagai pihak untuk mendukung program dan kebijakan yang ramah anak.

1.5.4 Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai representasi masyarakat umum harus memiliki kemampuan untuk memprioritaskan berbagai masalah yang paling menarik bagi mayoritas masyarakat yang beragam secara pluralistik. Salah satu cara utama pemerintah menjalankan peran ini adalah melalui kebijakan publik. Kebijakan publik mempunyai keterkaitan dengan administrasi publik karena berpengaruh dalam merumuskan kebijakan, implementasi

kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Kebijakan publik merupakan bagian dan aspek penting dalam bidang administrasi publik, karena berfungsi sebagai alat untuk merumuskan dan mengimplementasikan keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti politik, hukum, isu sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, kebijakan publik dapat dibedakan secara hierarkis menjadi tingkat nasional, regional, atau lokal. Hal ini berarti kebijakan publik dapat dirumuskan dan ditetapkan pada berbagai level pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan publik berperan penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat yang pluralistik dengan tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan.

William N. Dunn (Pasolong: 2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah dalam berbagai bidang tugas pemerintah yang saling terkait, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain

Thomas r. Dye (1981), kebijakan publik adalah segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye menjelaskan bahwa ketika pemerintah membuat keputusan untuk menjalankan suatu tindakan, maka harus ada tujuan (objektif) yang jelas. Kebijakan publik mencakup semua langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, sehingga tidak semata-mata merupakan keinginan pribadi pemerintah atau pejabat pemerintah belaka.

Menurut Chaizi Nasucha (Pasolong: 2022), kebijakan publik adalah wewenang pemerintah dalam merancang suatu keputusan yang kemudian diintegrasikan dalam bentuk aturan hukum. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengakomodasi dinamika sosial dalam masyarakat, sebagai dasar untuk membentuk kebijakan yang dapat menciptakan hubungan sosial yang seimbang dan harmonis. Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi kendala, hambatan, dan permasalahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan tertentu.

Dari uraian ahli tentang kebijakan publik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk menjalankan suatu tindakan dengan tujuan mengatasi kendala, hambatan, dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai dasar untuk membentuk kebijakan yang dapat menciptakan hubungan sosial yang seimbang dan harmonis. Dalam penelitian ini, Program Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi salah satu bentuk implementasi dari kebijakan perlindungan anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada efektivitas kebijakan yang mendasarinya, koordinasi antara stakeholder, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, guru, orang tua, dan siswa.

1.5.5 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik dirancang dengan tujuan agar masalah-masalah publik dapat diatasi secara efektif dan efisien. Selama proses penyusunan kebijakan publik, terdiri dari

sejumlah tahap karena melibatkan proses yang perlu dievaluasi oleh ahli atau pakar yang memiliki pemahaman mendalam terkait penelaahan kebijakan publik. Proses kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas intelektual dalam proses kegiatan yang memiliki sifat politis. William Dunn (1994) mengklasifikasi tahapan kebijakan publik menjadi sebagai berikut

1. Penyusunan agenda

Dalam dunia kebijakan publik, penyusunan agenda, juga dikenal sebagai agenda setting, adalah langkah dan proses yang direncanakan dengan baik. Penyusunan agenda berisi rumusan yang menganalisis masalah. Pada tahap penyusunan agenda, bisa terjadi bahwa beberapa masalah tidak mendapatkan perhatian sama sekali, sementara masalah lain menjadi fokus utama pembahasan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa masalah ditunda untuk jangka waktu yang lebih lama karena alasan tertentu.

2. Formulasi kebijakan

Pada tahap formulasi kebijakan, isu-isu prioritas yang terdapat dalam agenda kebijakan harus segera diatasi dan memberikan solusi terbaik untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk mencapai tahap ini, diperlukan pemahaman yang dapat memberikan informasi yang memiliki hubungan dengan kebijakan tentang solusi alternatif untuk masalah yang akan muncul di masa mendatang. Peramalan memeriksa masa depan yang mungkin untuk tujuan normatif, mengidentifikasi hambatan yang

mungkin menghalangi pencapaian tujuan, dan mengevaluasi pilihan politik yang berbeda.

3. Adopsi kebijakan

Pada tahap ini, terdapat beberapa analisis dan prediksi yang dilakukan untuk menghasilkan berbagai alternatif kebijakan. Pembuat kebijakan memberikan dan membuat rekomendasi terhadap alternatif kebijakan yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan dan prinsip-prinsip kebijakan dengan memperhatikan dukungan dari mayoritas legislatif, terdapat kesepakatan antara direktur lembaga atau putusan dari pengadilan.

4. Implementasi kebijakan

Pengambil kebijakan memantau dampak dari kebijakan yang diambil. Apakah kebijakan perlu dilanjutkan atau dihentikan. Pemantauan dilakukan untuk menemukan masalah-masalah yang muncul dari adanya kebijakan tersebut, serta memberikan solusi dari masalah tersebut. Tahap implementasi kebijakan terkait dengan cara kerja pemerintah atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan yang telah dirancang.

5. Evaluasi kebijakan

Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan. Evaluasi dilakukan agar pengambil kebijakan dapat menilai

penerapan kebijakan publik tersebut. Mereka dapat memberikan tanggapan, penilaian, serta kritik demi terciptanya kebijakan yang lebih bermanfaat bagi publik

Keberhasilan suatu kebijakan terlihat pada setiap tahap pembuatannya, sehingga diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur dan tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan harapan tujuan kebijakan akan terlihat setelah hasil output kebijakan dimanfaatkan dan disetujui kelompok sasaran, sehingga berdampak pada terealisasinya hasil dari kebijakan publik. Berdasarkan rangkaian proses Kebijakan Publik, fokus penelitian ini tertuju pada tahap ketiga, yaitu Implementasi Kebijakan. Fokus dalam penelitian ini ada pada tahapan implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

1.5.6 Implementasi Program

Implementasi program merupakan hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Program adalah sebuah rencana yang melibatkan berbagai unit yang mencakup kebijakan serta serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk diterapkan di lapangan. Program merupakan turunan dari suatu kebijakan. Program menjadi elemen penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Dengan adanya program, maka bentuk perencanaan suatu tindakan akan lebih teratur, tertata, dan mudah diimplementasikan. Saat merancang program, kebijakan harus menyebutkan secara rinci siapa yang akan melaksanakannya dan apakah program

tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan implementasi kebijakan publik yang tepat saat merancang dan melaksanakan program atau kebijakan publik.

Menurut Tayibnapis (2008), program merupakan segala sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, maupun organisasi dengan tujuan mendatangkan hasil yang diharapkan.

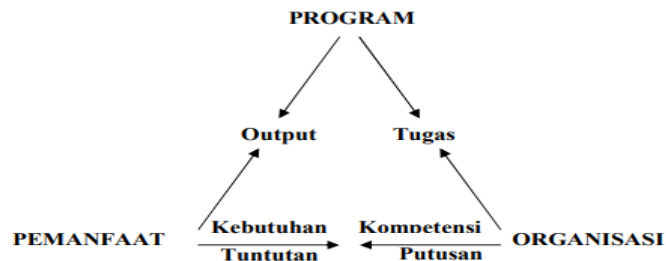
Dari pendapat beberapa ahli diatas Arikunto (2010) menjelaskan bahwa dalam penentuan program dilihat dari kesinambungan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan bukan kegiatan tunggal yang berlangsung secara singkat. Program itu adalah sebagai suatu kesatuan sistem.

Program merupakan sarana yang berfungsi dalam pencapaian tujuan. Charles O. Jones dalam (Bahri et al., 2020), membagi kedalam tiga kategori aktivitas dalam pengoperasian program yaitu:

1. Pengorganisasiaan, Pentingnya memiliki struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan program adalah untuk memastikan bahwa tim pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi, Para pelaksana program harus dapat mengimplementasikan program sesuai dengan petunjuk teknis dan instruksi yang telah ditetapkan, sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik.

3. Penerapan atau Aplikasi, penting untuk memiliki prosedur kerja yang jelas agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan program lainnya

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.



Gambar 1.3 Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber : David C. Korten dikutip oleh (Bahri et al., 2020)

Korten menggambarkan bahwa model implementasi program terdiri dari tiga elemen utama: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Menurut Korten dalam (Bahri et al., 2020), keberhasilan sebuah program tergantung pada keselarasan ketiga unsur implementasi program tersebut.

1. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (penerima manfaat).

2. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana dengan kapasitas dan kemampuan organisasi yang menjalankan program.
3. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Mencerminkan kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh organisasi untuk mencapai hasil program dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Peneliti memanfaatkan teori kesesuaian implementasi program yang diperkenalkan oleh David C. Korten untuk melihat pelaksanaan program Sekolah

Ramah Anak. Dalam konteks Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 73 Jakarta Selatan, model ini membantu menganalisis sejauh mana program sesuai dengan kebutuhan siswa, kesiapan sekolah dalam menjalankan program, serta apakah siswa mampu memperoleh manfaat program dengan optimal. Kompleksitas implementasi SRA yang melibatkan banyak pemangku kepentingan membuat teori ini relevan dalam mengidentifikasi potensi hambatan dan mencari solusi agar program berjalan efektif. Selain itu, insiden seperti kasus bullying yang berujung tragis menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan SRA, kapasitas sekolah, dan kebutuhan siswa. Dengan menggunakan teori Korten, penelitian ini dapat mengkaji secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SRA serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

1.5.7 Konsep Anak

Anak merupakan pribadi yang belum genap dan dibawah usia 18 tahun termasuk bayi yang masih di dalam kandungan, yang berarti bahwa semua upaya untuk melindungi anak harus dimulai saat anak itu masih di dalam kandungan, termasuk dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Anak-anak usia dini sedang melalui proses perkembangan yang cepat dan penting untuk kehidupan berikutnya, dan mereka memiliki batasan usia dan karakteristik khusus.

1.5.8 Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak adalah tempat pendidikan yang aman, bersih, sehat, dan berbudaya. Tempat yang dapat melindungi hak-hak anak dari ancaman seperti

kekerasan. Dengan adanya program ini, maka anak mendapat dukungan dalam segala aspek. Program ini merencanakan sistem pembelajaran, mekanisme pengaduan, dan kebijakan yang menjamin kenyamanan anak di bidang pendidikan.

SRA adalah suatu bentuk kerjasama menyeluruh Kementerian/Lembaga dan termasuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis satuan pendidikan secara bersama sama melindungi anak di satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak menyatakan bahwa ada beberapa indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) yang harus dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak/ SRA
 - a. Adanya SK dari pemerintah daerah (Kepala Daerah/Dinas PPPA/OPD Pengampu Satuan Pendidikan)
 - b. Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua
 - c. Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;

- d. Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan dan adanya pelarangan:
 - e. Melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan
 - f. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik
 - g. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
 - h. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun
 - i. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, kawasan bebas NAPZA, dan aman dari bencana
2. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Terlatih Konvensi Hak Anak/KHA (Adanya pelatihan, Guru dan Tenaga Pendidik mempunyai sertifikat pelatihan, pelatihan dilaksanakan oleh dinas terkait seperti Dinas PPPA/Disdik/Kanwil Kemenag/satuan pendidik).
 3. Proses Belajar yang Ramah Anak (Displin tanpa kekerasan dan merendahkan harkat dan martabat, menerapkan secara benar minimal 3 S, komunikasi dua

arah, bahasa positif dalam komunikasi, motivasi belajar, akrab dengan anak dll).

4. Sarana Prasarana Ramah Anak (Adanya papan nama minimal spanduk sekolah ramah anak, menumpulkan ujung meja, rambu-rambu pada tempat yang membahayakan, toilet terpisah antara laki-laki dan anak perempuan).
5. Partisipasi Anak (mengkomunikasi program sekolah dengan melibatkan anak, penataan kelas yang menyenangkan dengan melibatkan anak, anak sebagai pengawal sekolah ramah anak dan peer-educator).
6. Partisipasi orangtua, Lembaga masyarakat, Dunia Usaha, stakeholder lainnya (mensosialisasi SRA kepada sekolah dan mengajak orangtua mendukung SRA, membuat grup komunikasi dengan orang tua murid di setiap kelas, berjejaring dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha).

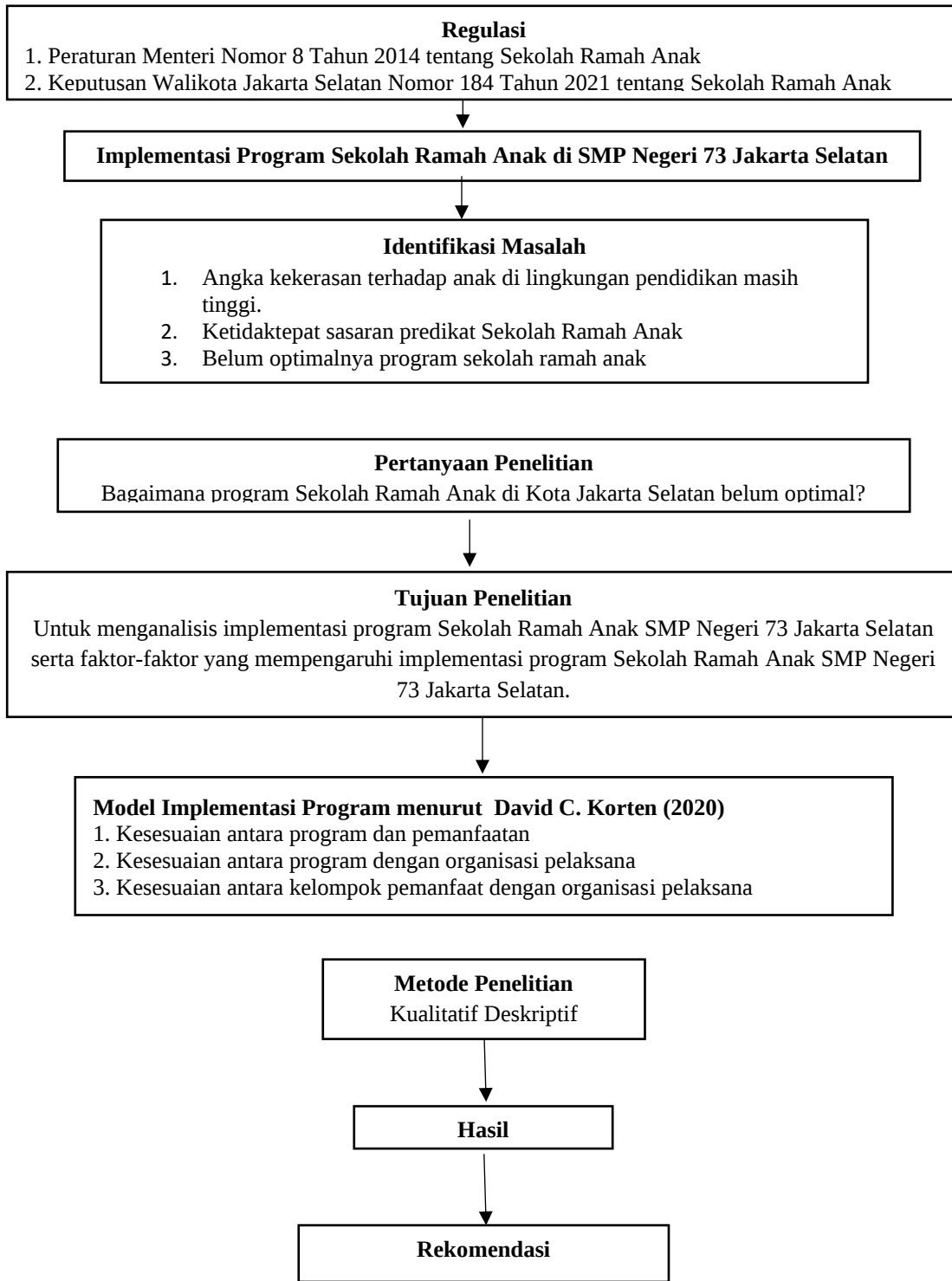
Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu program unggulan dari Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam berada di sekolah dengan konsep **BARIISAN** (Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri, Nyaman). Program ini memiliki tujuan, antara lain

1. Mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, ramah, dan berbudaya lingkungan hidup bagi anak
2. Memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

3. Mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang tidak melakukan kekerasan, tidak membeda-bedakan, aman, nyaman, dan transparan. Sekolah-sekolah ini juga mendorong partisipasi anak dalam semua kegiatan dan kehidupan sosial, dan mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta

Selatan

Operasionalisasi konsep merupakan proses yang bertujuan untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian-bagian supaya lebih mudah untuk dapat dipahami, serta mudah untuk diukur. Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional. Konsep Implementasi program Sekolah Ramah Anak adalah mencari dan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan terkait. Dalam konteks ini, pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak diterapkan sebagai upaya mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud guna memaparkan hal-hal yang akan digali lebih mendalam oleh peneliti dalam mendeskripsikan permasalahan-permasalahan di lapangan sebagai objek penelitian. Adapun fenomena yang akan diteliti yakni terkait dengan “Implementasi Program Sekolah Ramah di SMP Negeri

73 Jakarta Selatan”. Berikut merupakan fenomena yang akan diteliti dengan melihat keberhasilan Implementasi Program apakah sudah sesuai dengan fenomena yang dilihat dibawah :

1. Kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaatnya

- a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak melalui kegiatan sosialisasi
- b. Proses belajar dan kurikulum yang ramah anak dengan metode pengajaran yang bersifat partisipatif, inklusif, dan menumbuhkan rasa aman, adanya komunikasi 2 arah, bahasa positif, dan menerapkan 3S
- c. Penyediaan fasilitas yang aman dan mendukung prinsip ramah anak, seperti toilet yang bersih dan layak, ruang kelas yang nyaman, serta area bermain yang aman, bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan membuat siswa merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
- d. Perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah untuk mencegah bullying atau diskriminasi

2. Kesesuaian antara Program dan Organisasi Pelaksana

- a. Sekolah memiliki kebijakan formal melalui SK dari pemerintah daerah
- b. Komitmen organisasi pelaksana dalam menjalankan program melalui pembentukan Tim Sekolah Ramah Anak.

- c. Ketrampilan organisasi pelaksana dalam menjalankan program
- d. Pemahaman organisasi pelaksana mengenai pengelolaan dan prioritas anggaran, sehingga memastikan anggaran yang tersedia dialokasikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan program Sekolah Ramah Anak.
- e. Pemantauan dan evaluasi berkala oleh sekolah atas pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak.

3. Kesesuaian antara Kelompok Penerima dengan Organisasi Pelaksana

- a. Sekolah mengkomunikasikan program sekolah dengan melibatkan orangtua, Lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya
- b. Kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dalam hal anggaran untuk keberjalanan program Sekolah Ramah Anak.
- c. Partisipasi siswa dalam pelaksanaan dan pemantauan program SRA, seperti peer-educator dan pengawal sekolah ramah anak.

tabel 1. 7 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	c	Kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat	a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak melalui kegiatan sosialisasi	1. Apakah sekolah secara rutin mengadakan sosialisasi Program Sekolah Ramah Anak kepada siswa? Bagaimana bentuk kegiatannya?	1. Kepala Sekolah 2. Guru 3. Murid

			b. Proses belajar dan kurikulum yang ramah anak dengan metode pengajaran yang bersifat partisipatif, inklusif, dan menumbuhkan rasa aman, adanya komunikasi 2 arah, bahasa positif, dan menerapkan 3S	1. Seberapa penting penerapan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, dan bagaimana guru menerapkannya di dalam kelas? 2. Bagaimana guru menerapkan metode pengajaran bersifat yang partisipatif, inklusif, dan menumbuhkan rasa aman? 3. Bagaimana perubahan yang dirasakan siswa dalam interaksi mereka dengan guru setelah penerapan 3S dan penggunaan bahasa positif di sekolah?	
			c. Penyediaan fasilitas yang aman dan mendukung prinsip ramah anak, seperti toilet yang bersih dan layak, ruang kelas yang nyaman, serta area bermain yang aman, bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan membuat siswa merasa aman dan	1. Bagaimana kondisi fasilitas fisik di sekolah, seperti bagaimana kondisi toilet di sekolah dalam hal kebersihan dan kelayakan? Apakah toilet dirancang dengan mendukung privasi dengan menyediakan toilet terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan? dan kenyamanan siswa? 2. Bagaimana penataan ruang kelas di sekolah untuk menciptakan lingkungan	

			nyaman berada di sekolah.	belajar yang nyaman bagi siswa? Fasilitas apa saja yang ada di dalam ruang kelas yang mendukung proses belajar mengajar dengan baik? 3. Apakah sekolah menyediakan area bermain yang aman dan sesuai untuk siswa? Bagaimana pihak sekolah memastikan bahwa area bermain tersebut bebas dari potensi bahaya dan mendukung aktivitas fisik siswa? 4. Bagaimana kondisi tempat penyeberangan di sekitar sekolah untuk siswa yang datang dan pergi? Apakah ada petugas yang berjaga di lokasi tersebut, dan bagaimana tanda-tanda atau rambu yang ada membantu siswa untuk menyeberang dengan aman? 5. Bagaimana upaya sekolah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan sekolah, terutama di area-area berisiko seperti tangga, lapangan bermain, atau jalan menuju kelas?	
			d. Perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah untuk mencegah	1. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengaduan yang disediakan sekolah jika siswa mengalami bullying	

			bullying atau diskriminasi	atau diskriminasi? Langkah apa saja yang diambil sekolah dalam menangani pengaduan tersebut? 2. Bagaimana Anda melihat perubahan jumlah kasus kekerasan atau bullying di sekolah sejak diterapkannya mekanisme pengaduan? Apakah ada penurunan yang signifikan?	
2.		Kesesuaian antara Program dan Organisasi Pelaksana	a. Sekolah memiliki kebijakan formal melalui SK dari pemerintah daerah	1. Bagaimana regulasi atau peraturan yang digunakan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan?	1. Kepala Sekolah 2. Guru 3. Murid
			b. Komitmen organisasi pelaksana dalam menjalankan program melalui pembentukan Tim SRA	1. Bagaimana peran masing-masing anggota tim dalam menjalankan program SRA?	
			c. Ketrampilan organisasi pelaksana dalam menjalankan program	1. Apakah terdapat pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dan kepala sekolah dalam menjalankan program Sekolah Ramah Anak?	
			d. Pemahaman organisasi pelaksana mengenai pengelolaan dan prioritas anggaran,	1. Bagaimana sekolah mengelola anggaran khusus untuk Program Sekolah Ramah Anak dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)?	

			sehingga memastikan anggaran yang tersedia dialokasikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan program Sekolah Ramah Anak.	2. Bagaimana cara sekolah memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara tepat?	
			e. Pemantauan dan evaluasi berkala oleh sekolah atas pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak.	1. Seberapa sering sekolah melakukan evaluasi terhadap program Sekolah Ramah Anak? Apakah evaluasi dilakukan secara berkala atau hanya pada waktu tertentu?	
		Kesesuaian antara Kelompok Penerima dengan Organisasi Pelaksana	a. Tingkat Pemahaman Siswa Terhadap Program Dan Tujuan Program Sekolah Ramah Anak	1. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan sekolah untuk mengkomunikasikan program Sekolah Ramah Anak?	1. Kepala Sekolah 2. Guru 3. Murid 4. Orang tua
			b. Sekolah mengkomunikasikan program sekolah dengan melibatkan orangtua,	1. Bagaimana bentuk kerjasama dan partisipasi orangtua / wali siswa dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak?	
			c. Partisipasi siswa dalam pelaksanaan dan pemantauan program SRA, seperti peer-	1. Bagaimana siswa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di sekolah? Apakah pendapat	

			educator dan pengawal sekolah ramah anak.	mereka didengar dan diperhatikan? 2. Apakah ada inisiatif dari siswa untuk berperan sebagai peer-educator atau pengawal program Sekolah Ramah Anak? Bagaimana peran tersebut diterima di kalangan siswa?	
--	--	--	---	---	--

1.8 Argumen Penelitian

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk mengembangkan program-program yang dapat mengurangi insiden-insiden tersebut. Salah satunya mencanangkan program Sekolah Ramah Anak. Namun demikian, program ini belum dapat dianggap sebagai suatu yang sempurna dan efektif karena masih terjadi insiden-insiden kekerasan di sekolah yang melibatkan baik guru maupun murid itu sendiri.

Teori yang menjadi landasan penelitian adalah Teori Implementasi Program David C. Korten (1988), yang mengidentifikasi tiga faktor dalam keberhasilan implementasi program, yaitu: a) Memastikan program sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (kelompok sasaran), b) Memastikan program sesuai dengan organisasi pelaksana, dan c) Memastikan terdapat kesesuaian antara kelompok manfaat dan pelaksana. organisasi.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Sugiyono (2018), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan objektif dan langsung. Penelitian kualitatif menjelaskan dan memberikan pemahaman melalui data yang diteliti. Sedangkan menurut Purba et. Al., (2021), pendekatan deskriptif adalah beberapa kumpulan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti mengenai situasi, keadaan, dan gagasan objek yang ditafsirkan dengan benar.

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan secara mendalam kepada individu, kelompok, dan organisasi/institusi untuk menemukan deskripsi mengenai keadaan secara menyeluruh. Krisyantono (2020) berpendapat studi kasus merupakan pendekatan yang menggunakan variabel dan aspek individu, kelompok, maupun organisasi untuk dikaji secara menyeluruh. Yin (2020) juga menjelaskan studi kasus adalah metode yang mendeskripsikan fenomena dalam konteks kehidupan yang nyata dengan menggunakan pertanyaan ‘bagaimana atau mengapa’.

Peneliti memilih metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga peneliti dapat mengkaji, mendeskripsikan, dan menggambarkan secara dalam dan terperinci untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dengan menganalisis data

mengenai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan.

1.9.2 Situs Penelitian

Tempat peneliti mengamati, mempelajari, dan mengkaji objek untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penentuan lokasi ditujukan agar peneliti dapat menentukan topik dan tujuan penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Kota Jakarta Selatan dengan alasan Kota Jakarta Selatan merupakan wilayah kota di DKI Jakarta dengan tingkat kekerasan anak yang tinggi dan jumlah sekolah ramah anak yang masih sedikit. Penelitian akan berfokus pada sekolah yang menerapkan predikat Sekolah Ramah Anak (SRA) di DKI Jakarta.

1.9.3 Subjek Penelitian

Sumber informasi mengenai masalah yang ingin diteliti. Subjek penelitian juga bisa disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dapat menggambarkan kondisi penelitian. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan pihak yang akan dijadikan pemberi informasi. Teknik purposive sampling adalah pemilihan sample berdasarkan penilaian peneliti sendiri diantara kelompok populasi yang dipilih, dimana informan tersebut merupakan pihak yang paling mengetahui situasi objek penelitian.

Subjek penelitian yang diambil pada penelitian ini, yaitu aktor yang terlibat dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan, diantaranya adalah

1. Tim Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta

Informan menginisiasi, mengarahkan, dan mengawasi implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Informan juga terlibat langsung dan menjadi motor penggerak yang memastikan visi, misi, dan nilai-nilai program diintegrasikan dalam seluruh kegiatan sekolah.

2. Murid

Informan terlibat langsung dan merasakan proses belajar mengajar dalam program Sekolah Ramah Anak. Informan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dan program yang diterapkan berdampak pada kehidupan mereka di sekolah.

3. Orang Tua Murid

Informan berperan dalam mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Informan dapat memberikan umpan balik mengenai kenyamanan dan keamanan anak di sekolah.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian kualitatif memiliki jenis data berupa kata-kata, kalimat, gambar simbol yang menggambarkan atau mewakili orang, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis eksploratif ini, peneliti memfokuskan pada

data kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk naratif. Data kualitatif dapat berupa dokumentasi pada saat wawancara dengan informan dan proses belajar mengajar di sekolah

1.9.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data asli dan tidak melalui media perantara. Data bersifat langsung karena peneliti mendapat dari sumber dan tempat penelitian terjadi. Wawancara atau kegiatan tanya jawab antara peneliti dan informan (sumber) merupakan cara untuk memperoleh data primer mengenai implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan.

2. Data Sekunder

Data tidak langsung dan melalui perantara atau media. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder dari sumber yang dapat mendukung penelitian melalui dokumentasi, seperti foto, buku, grafis, jurnal, artikel, rekaman dan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Data mengenai program Sekolah Ramah Anak juga bisa didapat dari akun media sosial resmi, yaitu instagram Sekolah Ramah Anak. Media sosial tersebut berisi informasi-informasi berupa gambar, infografis, dan video mengenai proses implementasi

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih mengenai topik masalah tertentu. Data dari teknik pengumpulan ini dikumpulkan secara langsung melalui proses kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan informan. Pewawancara mengajukan pertanyaan mengenai topik masalah dan informan menjadi sumber jawaban atas pertanyaan tersebut.

Penelitian kualitatif memiliki teknik wawancara yang bersifat mendalam (*indepth interview*). Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur pada penelitian ini, dimana wawancara berasal dari pengembangan topik pertanyaan yang diajukan dan subjek bisa memberikan jawaban secara bebas, namun tetap sesuai dengan pedoman wawancara agar kegiatan tanya jawab tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak menyimpang.

2. Observasi

Melakukan pengamatan untuk menganalisis objek-objek penelitian. Observasi tidak hanya mengamati tingkah laku manusia namun objek alam sekitar. Peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, karena peneliti hanya mengamati objek penelitian dan tidak turut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program. Dalam

hal ini, peneliti akan meninjau langsung proses belajar mengajar di sekolah untuk mengetahui secara langsung implementasi Sekolah Ramah Anak.

3. Studi Literatur

Studi literatur juga digunakan pada penelitian ini sebagai teknik pendukung. Studi literatur data yang diperoleh melalui referensi jurnal-jurnal, buku dan bahan catatan lainnya yang relevan dan sesuai dengan implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) di DKI Jakarta.

4. Dokumentasi

Data berupa gambar, foto, sketsa, film, dan lain sebagainya. Peneliti mengumpulkan data dengan mencari keterangan dan bukti berupa foto yang berkaitan dengan proses implementasi program. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen resmi pemerintah, seperti peraturan-peraturan pemerintah.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Hurnberrnman, analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan model interaktif dalam proses pengumpulan, diantaranya ; reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (*verification*). Ketiga proses di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan, durasi peneliti di lapangan menentukan jumlah data yang didapat. Sehingga semakin lama maka data akan lebih kompleks dan rumit. Sehingga diperlukan reduksi data untuk penyederhanaan. Data yang lebih sederhana akan menyajikan gambaran data yang lebih sederhana sehingga peneliti akan lebih mudah untuk mengumpulkan data tambahan selanjutnya.

2. Penyajian Data

Data lebih teorganisir dan tersusun yang berupa berupa bagan, kata-kata, uraian, dan sebagainya. Peneliti menyajikan data mengenai implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan teks bersifat naratif disertai tabel dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan sekaligus jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakuratan dan kesalahan data dalam penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data pada suatu penelitian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Data dalam penelitian harus akurat dan valid. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengkaji dan menentukan keabsahan data yang peneliti dapat dari berbagai sudut pandang dengan cara mengurangi pemikiran yang bias dalam pengumpulan dan

analisis data sebanyak mungkin. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Peneliti menguji keakuratan dan kevalidan dari berbagai sumber data yang berbeda seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, yang dianggap memiliki perspektif berbeda. Lalu langkah selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menyepakati sumber-sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Data dengan sumber yang sama dan teknik berbeda merupakan teknik pengumpulan data untuk memastikan informasi agar lebih akurat dan valid. Jika hasilnya berbeda, maka peneliti harus bertanya dengan informan yang memberikan data agar terhindar dari inkonsistensi data.

3. Triangulasi Waktu

Peneliti mengecek data dengan mengumpulkannya di berbagai titik waktu. Dalam penelitian ini, informan diwawancarai mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00.

Tabel 1.8 Tabel Triangulasi

No	Aspek yang Dikaji	Triangulasi Sumber	Triangulasi Teknik	Triangulasi Waktu
1	Kebijakan Sekolah Ramah Anak	Wakil Kepala Sekolah, Guru	Wawancara, Analisis SOP Sekolah	Sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar
2	Proses Pembelajaran Ramah Anak	Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Guru, Siswa	Wawancara, Analisis Silabus & RPP	Sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar
3	Sarana dan Prasarana Ramah Anak	Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, Siswa	Wawancara	Sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar
4	Partisipasi Anak dalam Implementasi SRA	Wakil Kepala Sekolah, Siswa	Wawancara, Observasi Media Sosial	Sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar
5	Komunikasi Sekolah dengan Orang Tua	Wakil Kepala Sekolah, Orang Tua, Guru	Wawancara, Observasi Media Sosial	Sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar
6	Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Anak	Wakil Kepala Sekolah, Siswa, Guru BK	Wawancara, Analisis SOP Pengaduan	Sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar

Sumber : Diolah Penulis, 2025